

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM EKOWISATA DI

KELURAHAN LAKKANG KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

M.IDRIS

Nomor Stambuk : 10564 01268 11



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Ekowisata
Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar


Nama Mahasiswa : M. Idris

Nomor Stambuk : 10564.01286.11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dra. Hj. Mustiha Karim, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

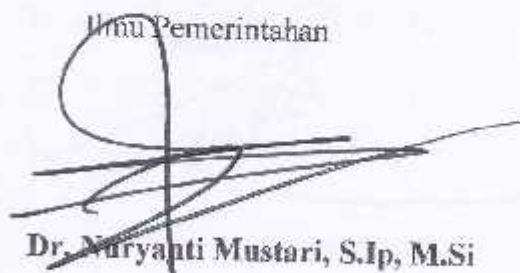
Dekan



Dr. Ilyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si

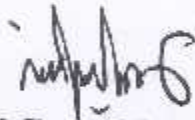
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar,

Nomor : 1342/FSP/A.I-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at tanggal 31 bulan Agustus Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Abdul Kadir Adys, SH., MM
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Hj. Andi Nuraeni Akxa, SH., MH
4. Drs. H. Mappigau Samna, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Idris

Nomor Stambuk : 10564 01268 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2018

Yang menyatakan,

M. Idris

ABSTRAK

M.IDRIS. Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata di Kelurahan Lakkang Kota Makassar. (dibimbing oleh Musliha Karim dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lakkang Kota Makassar dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologis, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber. Dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknik dalam peran pemberdayaan masyarakat. Data yang digunakan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ekowisata yang direncanakan oleh pemerintah Kota Makassar dan menempatkan Kelurahan Lakkang sebagai destinasi ekowisata, dapat dilihat dari (1). partisipasi dengan cara memberikan informasi, (2). partisipasi fungsional, (3). partisipasi interaktif, (4). mobilisasi diri.

Kata Kunci : Partisipasi dan Ekowisata

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala selaku yang khalik karena atas limpahan Rahmat dan Taufik dan Karunia-Nyalah, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul Partisipasi Masyarakat Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar telah diselesaikan sebagai upaya untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menuliskan skripsi ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena ketebatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun semua itu telah dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Ayahanda H. Tike dan seluruh kakak H.Zainuddin, Mahmud Mappotto yang penuh keikhlasan, kesetiaan, kesabaran memberi doa dan membiayai penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada tingkat sarjana (S1). Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Ibu Dra. Musliha Karim, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Rahardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senang tiasa telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan solusi terbaik kepada penulis.

1. Ibu Ihyani Malik, S.Sos, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Nuriyanti Mustari, S.Ip, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada saudaraku Irsyad Aras, S.Ip, Abdul Rahman, S.Ip yang selalu memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada teman –teman organisasi, Ikatan Alumni SMAN 19 Makassar, Ikatan Pemuda Mattirowalie-Bune, A2 Management, Paskibra SMAN 19 Makassar, yang telah memberikan semangat dan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah Subhana Wata'ala senantiasa selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Makassar, 2018

M. Idris

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	7
B. Kesetaraan Gender.....	17
C. Keterlibatan.....	18
D. Aspek Keterampilan Perempuan	19
E. Pengertian Partisipasi... ..	21
F. Kerangka Pikir	24
G. Fokus Penelitian	24
H. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Penelitian	27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisa Data.....	30
G. Pengabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
B. Program Ekowisata Kota Makassar.....	42
C. Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

Gambar

Gambar 1 Peta Administrasi Kota Makassar34

Tabel

Tabel 1 Informan.....	29
Tabel 2 Luas Wilayah	33
Tabel 3 Jumlah Penduduk	40
Tabel 4 Persentase Penduduk	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan relasi dan peran gender antara laki-laki dan perempuan terjadi karena adanya aturan, tradisi dan hubungan social timbale balik yang menentukan batasan taraf eminitas dan maskulinitas. Semua ini mengakibatkan adanya pembagian kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang selanjutnya berimbang dalam kehidupan sosial.

Kehidupan sosial, berkembang mitos bahwa laki-laki lebih tinggi keududukannya dari pada perempuan karena laki-laki lebih cerdas, kuat dan tidak emosional. Mitos tersebut mempengaruhi perilaku orang tua dalam mendidik anak. Selain itu penafsiran ayat-ayat agama yang menafsirkan perempuan secara tradisioanal dan subjektif, serta budaya patriaki yang memandang kekuasaan berada ditangan laki-laki juga menyebabkan kerugian terhadap perempuan.

Nilai-nilai pembagian kerja yang menekankan bahwa dunia rumah tangga sepenuhnya milik perempuan menyebabkan tugas-tugas perempuan hanya terfokus pada sumur, dapur dan kasur. Kondisi ini menyebabkan kiprah perempuan didunia politik tertinggal dari laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam dunia public diminimalisir. Peran perempuan hanya sebatas merawat rumah. Sementara dunia publik sepenuhnya milik laki-laki. Dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan menyebabkan perempuan mengalami beragam diskriminasi baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, politik, maupun keagamaan.

Data BPS tahun 2010 menunjukkan angka melek huruf laki-laki adalah 95,65 persen sedangkan perempuan 90,52 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibandingkan perempuan selain itu, ditahun 2010 rata-rata lama sekolah laki-laki adalah 8,34 tahun sementara perempuan yaitu 7,5 tahun, yang artinya laki-laki menikmati pendidikan lebih lama dibandingkan perempuan.

Dengan kelompok usia tertentu, data survey sosail ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 menunjukkan bahwa angka melek huruf bagi laki-laki berumur 18 tahun keatas sekitar 95,31 persen sedangkan perempuan mencapai 89,36 persen pada umur yang sama. Angka melek huruf tersebut lebih rendah bila dibandingkan laki-laki pada umur 18 tahun keatas (profil perempuan Indonesia, 2012:43). Dengan rendahnya tingkat pendidikan perempuan biasa berimplikasi pada rendahnya kapasitas perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55juta orang (11,47 persen) bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2013 sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen). Selama periode Maret-September 2013, jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan naik sebanyak 0,30juta orang (dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013). Sementara didaerah pedesaan naik sebanyak 0,18juta orang (dari 17,74 orang pada maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013). Selama periode Maret-

September 2013 tersebut, persentase penduduk miskin didaerah perkotaan pada maret 2013 sebesar 8,39 persen, naik menjadi 8,52 persen pada September 2013. Sementara persentase penduduk miskin didaerah pedesaan meningkat dari 14,32 persen maret 2013 menjadi 14,42 persen pada September 2013.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa diperlukan adanya pembangunan nasional bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional bersama merupakan serangkaian proses perubahan yang diupayakan pemerintah Indonesia bersama seluruh warga atau masyarakat Negara Indonesia, dengan mengharapkan terwujudnya masyarakat Indonesia menuju kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan tersebut harus ditopang oleh seluruh anggota masyarakat, baik pria dan wanita, yang meliputi seluruh bidang kehidupan. Sejalan dengan itu upaya peningkatan peran wanita juga diarahkan antara lain pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas dan kemandirian serta kemajuan sumber daya manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia, serta mendorong dan meningkatkan peran secara aktif dan swadaya seluruh masyarakat.

Perwujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan di Indonesia tercantum dalam Inpres No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional. Inpres No.9 2000 jelas menginstruksikan pelaksanaan pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah.

Indonesia juga telah menyepakati komitmen Internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations

Against Women) dan landasan aksi Beijing, maka pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional yang dijadikan sebagai integral dari pembangunan sumber daya manusia, dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 mengamanatkan, bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan perlu dibentuk satu lembaga yang mampu mengemban kebijakan nasional dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

Program pemberdayaan perempuan merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Berdasarkan keputusan presiden Nomor 9 Tahun 2005, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan.

Undang-undang No. 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam sepuluh tahun terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sector potensial yang mampu meningkatkan nilai Gross Domestic Product (GDP) (World Travel and Tourism Council, 2015). Didunia, pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-34 (Schwab, 2014). Salah satu unsure penting dalam pariwisata adalah objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang

memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2, objek-objek wisata yang terdapat di Makassar Tengah telah dikelompokkan kedalam enam klaster. Klaster tersebut yaitu benteng roderdan, pantai losari, samalona, ,laikan, Pembentukan klaster pariwisata tersebut didasari atas Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). Dalam hal ini, RIPPARNAS mengklasifikasikan daerah pariwisata di Indonesia menjadi Daerah Pariwisata Nasional (DPN). Pada pasal 10 dijelaskan bahwa criteria pembentukan DPN adalah berdasarkan pada kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang memiliki daya tarik pariwisata yang berkualitas dan dikenal secara luas baik nasional maupun internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisata; memiliki kesesuaian daya tarik pariwisata untuk mendukung penguatan daya saing; dan memiliki jejaring aksesibilitas serta infrastruktur yang mendukung pariwisata. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011, keempat klaster pariwisata yang terdapat di Makassar Tengah dibentuk atas dasar letak letak geografis, daya tarik yang dikenal luas, dan kesamaan jenis-jenis wisata yang ditawarkan seperti wisata religi, wisata budaya, wisata alam, dan wisata belanja.

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata di Kelurahan Lakkang Kota Makassar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang ,maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan KelurahanKota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refrensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang mengenai partisipasi masyarakat dalam program ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar.

2. KegunaanPraktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumber sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah kota Makassar .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Hasan Shadily, (2000). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan, I Nyoman Sumaryadi (2010). Pengertian tentang partisipasi dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa, Fasli Djalal (2001).

Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R. Tilaar, (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Simatupang, (1970), memberikan pengertian partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan yaitu bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa untuk membangun masa depan bersama.
- 2) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberi sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- 3) Partisipasi tidak hanya mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan rencana pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan itu, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- 4) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia.

Sugiyah, (2001) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Rukmana (1993) menambahkan dimana partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung adalah berupa bantuan keuangan atau materi yang dibutuhkan dalam kegiatan yang dilakukan.

Empat bentuk partisipasi yang dapat diperankan oleh masyarakat dalam proses pembangunan yaitu :

- 1) Partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan, yaitu peranserta yang dilakukan pada tahap suatu kegiatan sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 2) Partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan rencana, yaitu peranserta yang dilakukan pada tahap dimana kegiatan yang direncanakan sedang berjalan.
- 3) Partisipasi dalam menikmati hasil, yaitu mereka yang dapat menikmati hasil atau keuntungan dari adanya suatu kegiatan.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi. yaitu partisipasinya terlihat pada saat telah selesai kegiatan fisik, misalnya respon masyarakat dapat diartikan umpan balik (*feedback*) sebagai masukan bagi kegiatan sejenis apakah dilanjutkan atau tidak pada masa berikutnya.

Siti Irene Astuti D, (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam

pelaksanaan Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi terbagi atas, Siti Irene Astuti (2011):

- a. Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. Partisipasi horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Siti Irene Astuti, (2011), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi non fisik Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Bentuk atau tahap partisipasi menjadi 6 bentuk/tahapan.Ndraha, (1990) yaitu:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, dan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terjadinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menurut Cohen dalam (Syamsi, 1986) disebabkan karena empat hal.Pertama, dari segi basisnya, yaitu partisipasi karena desakan (*impetus*) dan partisipasi karena adanya insentif.Kedua, segi bentuk yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan dari pimpinan kelompok, dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh individu itu sendiri.Ketiga, segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan di luar untuk kepentingan pribadinya. Keempat, dari segi efektivitasnya, yaitu dengan

menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontribusi yang tentunya pada akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya. Dilihat dari keempat segi partisipasi tersebut di atas bila dilihat dari prakarsa terjadinya partisipasi maka bisa digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi yang datang dari atas (*with initiative coming from the top down*), dan partisipasi yang datang dari bawah (*with initiative coming from the bottom up*). Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa, (1999) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

1) Partisipasi pasif/manipulative

- (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi
- (b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat
- (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- (d) Partisipasi dengan cara memberikan informasi
 - (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya
 - (b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian

- (c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat
- (e) Partisipasi melalui konsultasi
 - (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi
 - (b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat
 - (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama
 - (d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
- (f) Partisipasi untuk insentif materil
 - (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya
 - (b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya
 - (c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
- (d) Partisipasi fungsional
 - (a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek
 - (b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati

(c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

(d) Partisipasi interaktif

(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada

(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis

(c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan

(e) *self mobilization*

(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki

(b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan

(c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

2. Pengertian Masyarakat

Sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri yang hidup bersama-sama yang cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu, Paul B. Harton(1978)

Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan. Ralph Lington, (1988). Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1994) bahwa: “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.”Selanjutnya M. CholilMansyur, (1989) memberikan batasan sebagai berikut : “Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersekutukandengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka.” Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahuimelalui adanya kontak sosial (Social

Contact) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan

1. Kestaraan Gender

Mengikis kontruksi budaya yang tidak berkeadilan gender, tentu saja memahami dahulu konsep kesetaraan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan lebih dimaknai dengan berkeadilan, berkesinambungan, dan kearmonisan akibat dari eksistensi dari kedua bela pihak.

Prinsip kesetaraan dan keadilan gender dan diungkap dalam profi gender dan anak 201-yakni antara lain 1).Menghargai hak setiap individu namun mengakui adanya perbedaan (unity and equa in diversity). Hak-hak perempuan dan anak perempuan dijamin dalam hak-hak asasi manusia universal, 2).Kesamaan tanggung jawab (shared resposnsibility) antara laki-laki da perempuan, 3).Kemitraan yang harmonis (harmonius partnership) dalam pengambilan keputusan mulai dari keluarga, 4).Pelaksanaan gender harus bersifat menyeluruh dan terpadu (holistic and intergrity), karena itu diperlukan adanya pendekatan yang multidisipliner untuk perubahan social, budaya ekonomi yang lebih setara gender.

Kesetaraan dan keadilan gender di indonensia tercantum dalam inpres No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan. Kesetaraan yang berkeadilann gender adalah kondisi yang dinamis, dimana laki- laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan yang dilandasi sikap dan prilaku saling

menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi diberbagai 18amper.

C. Keterlibatan

a. Pengertian keterlibatan

Keterlibatan dalam kamus besar Indonesia (KKBI) berarti keadaan terlibat. Terlibat sendiri berarti adanya keikutsertaan individu atau berperannya sikap ataupun emosi indnividu dalam situasi tertentu.

Memperluas cakrawala keterlibatan social perempuan merupakan penegasan kondisi perempuan yang mengalami peningkatan dalam masyarakat. Hal tersebut didorong oleh kesadaran mendalam terdapat peran perempuan dalam upaya membangun dan mengembangkan masyarakat. Perlunya perluasan cakrawala keterlibatan social perempuan, yaitu dengan menggabungkan urgensi keterlibatan politik perempuan kedalam aspek social, sehingga tidak hanya membatasinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan politik, namun 18amp mencakup bidang-bidang yang lebih luas. Artinya, keterlibtan tersebut merambat kepada kehidupan umum dan perhatian terhadap masalah-masalah nasional secara menyeluruh.

Keterlibatan perempuan tersebut berarti ikut memberikan solusi bagi masalah-masalah social, ekonomi dan politik, juga memperluas peran perempuan di berbagai osisasi dan organisasi nasional serta berbagai bentuk kerja sama, disamping lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lepas dari sisi-sisi social aktivitas politik.

D. Aspek Keterlibatan Perempuan

Moser framework menganggap bahwa dikebanyakan masyarakat, perempuan yang berpendapatan rendah memiliki tiga peran: perempuan mengurus kegiatan-kegiatan reproduktif, produktif dan pengaturan masyarakat, sedangkan laki-laki mengurus kegiatan-kegiatan produktif dan politik dalam masyarakat.

1. Kerja reproduktif

Melibatkan kepedulian dan pelestarian rumah tangga dan keluarganya termasuk melahirkan dan merawat anak-anak, mempersiapkan makanan, mengambil air dan bahan bakar, berbelanja, merawat rumah dan kesehatan keluarga. Kerja reproduktif sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian reproduksi angkatan kerja, tetapi hal itu jarang dianggap sebagai “pekerjaan yang benar-benar pekerjaan”. Di masyarakat miskin, pekerjaan reproduktifnya adalah – dibanyak wilayah – kerja kasar yang insentif dan menyita waktu hal tersebut 19 jamper selalu menjadi kewajiban para perempuan dan anak-anak perempuan.

2. Kerja produktif

Melibatkan produksi barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperdagangkan/dijual (pertanian, perikanan, ketenagakerjaan dan mempekerjakan diri sendiri). Ketika orang ditanya apa pekerjaan mereka, jawaban yang diberikan paling sering mengacu pada kerja reproduktif, terutama pekerjaan yang mendapatkan bayaran dan menghasilkan pendapat. Baik perempuan maupun laki-laki dapat

terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif, tetapi sering kali fungsi dan tanggung jawab mereka berbeda. Pekerjaan produktif perempuan seringkali lebih tidak terlihat dan lebih tidak dihargai dibandingkan pekerjaan produktif laki-laki.

3. Pekerjaan kemasyarakatan

Melibatkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas social secara bersama: upacara-upacara dan peringatan-peringatan, kegiatan-kegiatan peningkatan masyarakat, partisipasi dalam kelompok dan organisasi, kegiatan-kegiatan politik local dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini jarang dipertimbangkan atau dilihat dalam analisis ekonomi suatu masyarakat. Tetapi jenis pekerjaan ini melibatkan jumlah waktu yang cukup besar yang diberikan secara suka rela dan penting bagi perkembangan sprititual dan budaya masyarakat dan merupakan suatu kendaraan untuk pengaturan untuk penentuan nasib masyarakat. Baik perempuan maupun laki-laki terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, meskipun suatu pembagian kerja berdasar gender juga berlaku disana. Moser membagi pekerjaan kemasyarakatan menjadi dua jenis pekerjaan yang berbeda.

a. Pekerjaan pengaturan masyarakat

Kegiatan-kegiatan dtangani terutama oleh perempuan ditingkat masyarakat, sebagai perluasan dari peran produktif mereka untuk menjamin ketersediaan dan pelestarian dan sumber-sumber daya konsumsi kolektif yang jarang, seperti air, perawatan kesehatan dan

pendidikan. Ini adalah pekerjaan sukarela yang tidak dibayar, dijalankan di "waktu senggang".

b. Politik kemasyarakatan

Kegiatan-kegiatan ini ditangani terutama oleh laki-laki pada tingkat masyarakat, pengaturan pada tingkat politik formal yang sering kali berada dalam suatu kerangka politik nasional. Pekerjaan seperti itu biasanya dibayar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemberian status atau kekuasaan.

Wanita, laki-laki, anak-anak laki-laki, dan perempuan sepertinya terlibat dalam ketiga bidang pekerjaan. Laki-laki terlihat lebih sedikit terlibat dalam pekerjaan reproduktif. Di banyak masyarakat, perempuan mengerjakan hampir semua pekerjaan reproduktif dan banyak pekerjaan produktif

E. Pengertian partisipasi

Partisipasi dalam kamus besar Indonesia (KKBI) yaitu, perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan: keikutsertaan; peran serta. Sedangkan berpartisipasi yaitu, melakukan partisipasi; berperan serta (dalam suatu kegiatan), ikut serta.

a. Macam-macam partisipasi

Macam- macam partisipasi menurut Jule (1996), yaitu:

1. Partisipasi dengan cara memberikan informasi

Adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta melalui proses memberikan informasi, atau dengan menjawab pertanyaan yang

diajukan. Pihak ahli (pihak luar) mendefinisikan masalah dan proses pengumpulan informasi, dan dengan demikian mengendalikan Analisa masalah. Proses ini kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan para ahli tidak berkewajiban untuk mengajukan/ membela pandangan masyarakat.

2. Partipasi fungsional

Adalah suatu kondisi dimana pihak luar memandang partisipasi sebagai tujuan untuk mendapatkan proyek, terutama penghematan biaya proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berkaitan dengan tujuan proyek. Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk interaktif (timbang balik) dan umumnya melibatkan proses pengambilan keputusan secara bersama, yang cenderung dilakukan setelah arahan keputusan ditentukan ahli dari pihak luar. Ada kemungkinan masyarakat masih terkooptasi demi pencapaian tujuan yang ditentukan oleh pihak luar.

3. Partisipasi interaktif

Adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta dalam Analisa secara Bersama, pengembangan langkah-langkah kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan local. Partisipasi dipandang sebagai hak, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan untuk mencari keragaman pandangan, dan menggunakan proses pembelajaran yang sistematis

dan terstruktur. Pada saat kelompok masyarakat mengambil alih keputusan local akan dimanfaatkan, mereka berkepentingan untuk mempertahankan struktur kelembagaan dan praktek-praktek pembangunan yang baik.

4. Mobilisasi diri

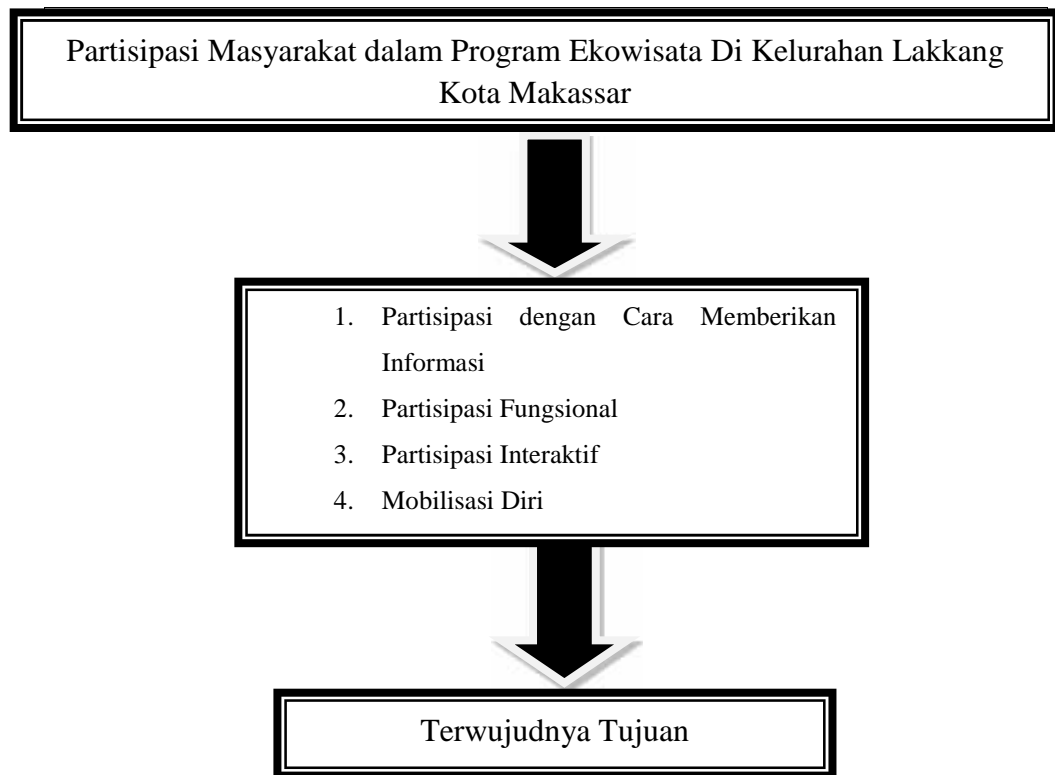
Adalah suatu kondisi dimana masyarakat berpartisipasi didalam berinisiatif secara mandiri untuk melakukan perubahan system. Mereka menjalin hubungan dengan pihak luar untuk memperoleh sumber daya dan pendapat teknis yang mereka butuhkan, tetapi tetap memegang kendali atas bagaimana sumber daya itu akan digunakan. Mobilisasi diri dapat berkembang laus jika pemerintah dan LSM memberikan dukungan konstruktif

F. Kerangka pikir

Partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Sekretariat Bina Desa (1999) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristiknya. (a). Partisipasi dengan cara memberikan informasi (b). Partisipasi fungsional, (c). Partisipasi interaktif, (d). Mobilisasi diri

Kerangka pikir tentang Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan guna terwujudnya tujuan dari program ekowisata yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota Makassar ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Mempermudah penulis untuk menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam program ekowisata Di Kelurahan di Kota Makassar

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi dengan cara memberikan informasi artinya partisipasi yang dilakukan dengan cara terlibat aktif dalam memberikan informasi apapun yang terkait dengan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Partisipasi dengan cara memberikan informasi sebagai berikut :

- a. Mengajukan pandangan, dalam hal ini masyarakat mengajukan suatu pandangan atau pendapat tentang kegiatan atau program yang akan dilaksanakan
 - b. Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti kuesioner
 - c. Berpartisipasi dengan cara memberrikan informasi yang seluas-luasnya dalam membantu program yang akan dijalankan
2. Partisipasi fungsional adalah partisipasi yang dilakukan dengan cara ikut terlibat aktif dalam kegiatan dengan cara ikut terlibat dalam suatu kelompok usaha atau kerja yang telah terbentuk yang dimanan tujuannya selaras dengan program yang akan dilaksanakan. Partisipasi fungsional sebagai berikut :
- a. Terdaftar sebagai anggota ataupun pengurus dalam suatu kelompok usaha yang telah ada.
 - b. Berpartisipasi dengan cara ikut aktif dalam kegiatan yang telah ditentukan oleh kelompok yang telah ada
 - c. Ikut merumuskan program-program yang akan dijalankan oleh kelompok yang telah ada
3. Partisipasi Interaktif adalah masyarakat menganalisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan yang telah ada. Partisipasi interaktif sebagai berikut :
- a. Kelompok yang telah ada sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana.

- b. Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga yang ada ataupun pembentukan lembaga baru.
 - c. Berpartisipasi dengan cara ikut berperan sebagai pengontrol atas keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga
4. Mobilisasi Diri, partisipasi yang dilakukan dengan cara masyarakat secara bebas tanpa pengaruh dari luar untuk mengembangkan maupun mengubah sistem yang ada di dalam kelompok yang telah ada.
- a. Mengambil inisiatif secara bebas tanpa tekanan dari pihak luar
 - b. Masyarakat ikut membantu kelompok mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan
 - c. Masyarakat ikut memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada
5. Terwujudnya tujuan ekowisata adalah berkembangnya suatu daerah dalam segi pembangunan masyarakat yang berkemajuan dalam sektor pariwisata dan budaya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah 2 bulan setelah seminar proposal, Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya berada di Kelurahan Lakkang dengan disertai dasar Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi tempat yang kami teliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tipe fenomenologis bahwa informasi yang akan digali dalam berkaitan dengan penghayatan, pengalaman, pemahaman dan pemberian arti dari informan tentang partisipasi masyarakat dalam program ekowisata di Kelurahan Lakkang Kota Makassar. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka

tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambaran secara holistik.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari kantor kecamatan setempat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informasi Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. Adapun yang akan dijadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan

NO.	Nama	Inisial	Jabatan/Status	Ket.
1	Andi Rusmayani Majid	ARM	Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar	1 Orang
2	PrasetyoSutomo	PS	Kepala Bidang Umum Dinas Pariwisata Kota Makassar	1 Orang
3	Taufik Firmansyah	TF	Pegawai Dinas Pariwisata Kota Makassar	1 Orang
4	Ambo Nai'	AN	Tokoh Masyarakat di Kelurahan Lakkang	1 Orang
5	Kasim	Ks	Ketua Usaha Bersama Di Kelurahan Lakkang	1 Orang
6	Hamid	Ha	Warga Kelurahan Lakkang	1 Orang
7	Jannah	Jn	Warga Kelurahan Lakkang	1 Orang
8	Firman	Fr	Tokoh Pemuda di Kelurahan Lakkang	1 Orang
9	Widya	Wy	Penjual souvenir di Kelurahan Lakkang	1 Orang
JUMLAH INFORMAN		9 Orang		

E. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan (dialog) kepada informan sebagai narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami objek dan permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen, buku yang mengenai dengan Partisipasi Masyarakat dalam Ekowisata di Kota Makassar.

3. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung aktifitas masyarakat sehari-hari utamanya kegiatan yang menyangkut pemasaran citra dan identitas Kota Makassar dan segala aspek kehidupan sehingga menarik untuk mengkaji (penelitian). Maupun pada saat penelitian yang sesungguhnya sebagai bahan banding terhadap teknik pengumpulan data lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. Sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan ,analisis data adalah” proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori.

G. Pengabsahan Data

Sugiono (2009), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiono (2009), ada 3 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sebelum memulai hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar, penulis akan memaparkan lokasi penelitian, yaitu :

1. Letak Geografis

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan

Kabupaten Gowa, Maros danPangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

2. Karakteristik Wilayah Kota Makassar

a) Luas dan batas wilayah administrasi

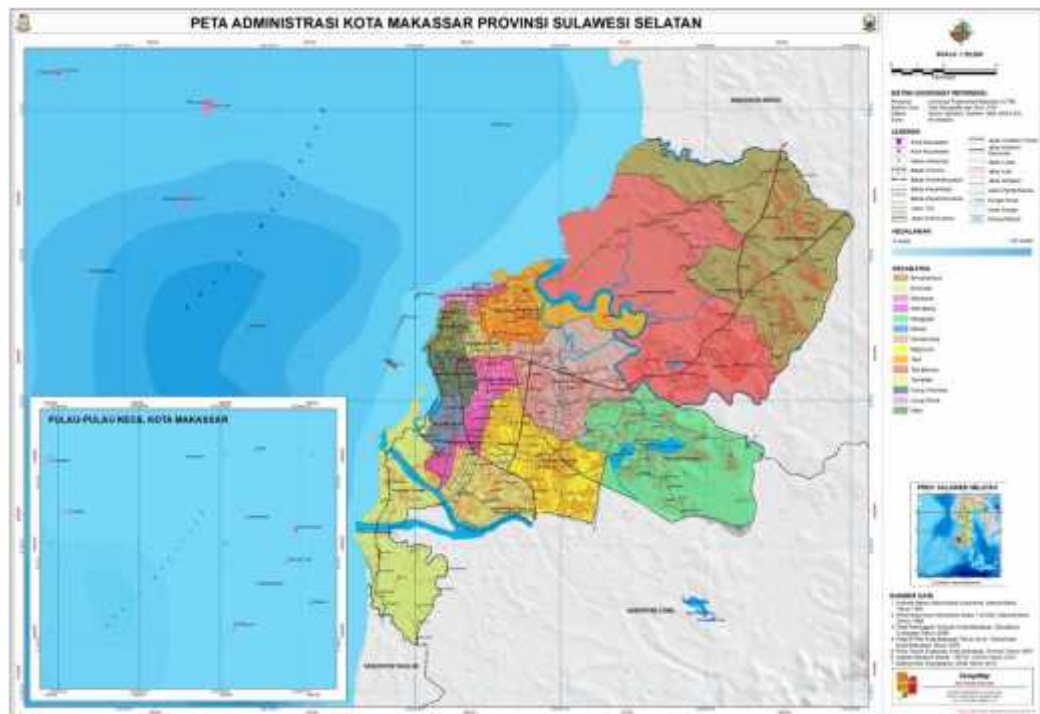
Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- I. Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- II. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- III. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- IV. Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Secara administratif, 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar

Peta Administrasi Kota Makassar



Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau KodingarengLompo, Pulau BarrangLompo, Pulau BarrangCaddi, Pulau KodingarengKeke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat).

3. Penduduk Kota Makassar

Kota makassar kini berkembang tidak lagi sekedar *gateway* namun diposisikan sebagai ruagn keluarga (*living room*) di Kawadan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk.

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk terbesar yang dirinci menurut kecamatan terdapat di kecamatan Tamalate sejumlah 172.506 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,48 sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di kecamatan Ujung Pandang sejumlah 27.160 dengan laju pertumbuhan (0,73)persentase penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 12,52% dengan tingkat kepadatan penduduk 6,10%. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam artian luas wilayah yang besar tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang

besar demikian pula sebaiknya luas wilayah yang kecil tidak harus mempunyai penduduk yang kecil pula.

Dilihat dari struktur penduduk, masyarakat Kota Makassar didominasi penduduk usia muda. Konsentrasi penduduk sebagian besar berada pada kelompok usia 15 – 29 tahun dan paling sedikit penduduk pada usia 60 – 64 tahun

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 202,502 jiwa atau sekitar 12,76% dari total penduduk, disusul kecamatan Tamalate sebanyak 194,493 jiwa (12,52%). Kecamatan Rapocini sebanyak 164,563 jiwa (11,28%), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 28,497 jiwa (2,01%).

4. Visi dan Misi Kota Makassar

1) Visi Kota Makassar

Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, yakni “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 adalah “Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : *Pertama* , yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional , nasional dan global. *Kedua*, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai- nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur

Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut : “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”. Visi tersebut mengandung makna :

1. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya;
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;
3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

2). Misi Kota Makassar

Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun

2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik.

5. Kelurahan Lakkang

Kelurahan Lakkang terletak di Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Sulawesi Selatan. Secara historis, daerah ini awalnya bernama Bonto Malangeree yang penduduk aslinya merupakan pindahan dari Gowa. Sehingga daerah ini di kenalsampai sekarang dengan daerah Lakkang yang dalam bahasa Makassar berarti Pindah. Batas-batas administrasi kelurahan Lakkang sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kec. Tamalanrea (Kel. Kapasa dan Kel. Parangloe)
- 2) Sebelah selatan : Kecamatan Panakukang (Kel. Pampang)
- 3) Sebelah barat : Kel. Rappokalling dan Kel. Parangloe

4) Sebelah timur : Kec. Tamalanrea (Kel. Tamalanrea Indah)

1. Keadaan Demografi

Komposisi Penduduk

Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah. Mereka menetapkan membangun kebudayaan (adat istiadat) sebagai hasil interaksi kehidupan sehari-hari. Masyarakat Pulau Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tidak hanya terdiri satu suku saja, nmaun terdiri dari berbagai suku diantaranya suku Bugis dan suku Makassar. Adanya perbedaan suku ini terjadi karena adanya penduduk urbanisasi, pernikahan, khususnya Sulawesi Selatan yaitu Pulau Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa jumlah penduduk Pulau Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Total	Persentase
1.	Pria	438	48,6
2.	Wanita	467	51,4
Jumlah		905	100

Sumber : Kelurahan Lakkang, 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui di Pulau Lakkang jumlah penduduk sebanyak 905 jiwa dimana komposisi penduduk lebih didominasi oleh perempuan yaitu 51,6 % atau 467 jiwa dari total keseluruhan penduduk.

Tabel 3 Kualifikasi Penduduk Menurut Usia

No	Uraian (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0-9	39	41	80	8,8
2	10 – 19	66	59	125	13,8
3	20 – 29	41	45	86	9,5
4	30 – 39	122	114	236	26,1
5	40 – 49	80	93	173	19,1
6.	50	90	115	205	22,70

Jumlah	438	467	905	100
--------	-----	-----	-----	-----

Sumber : Kantor Kelurahan Lakkang 2016

Dari Tabel diatas dapat dilihat pulau Lakkang didominasi oleh penduduk usia 30-39 tahun atau sebanyak 236 jiwa. Ini berarti kualifikasi penduduk di Pulau Lakkang lebih banyak pada usia angkatan kerja dan yang paling rendah berada pada usia 0-5 tahun yaitu sebanyak 80 jiwa

Penduduk Pulau Lakkang memiliki profesi yang beragam. Jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak pada profesi mahasiswa/pelajar yaitu 230 jiwa atau 24,4 %, kemudian profesi petani/nelayan 166 jiwa atau 18,3 %. Di Pulau Lakkang sebanyak 330 jiwa penduduk yang tidak memiliki pekerjaan baik pada usia angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja, dengan demikian jumlah pengangguran di Pulau Lakkang masih tergolong tinggi.

Tabel 4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	DO/Belum Sekolah	263	29,10
2	SD	357	39,40
3	SMP	125	13,80
4	SMA	140	15,50
5	DIPLOMA (I,II,III)	13	1,40
6	Sarjana	7	0,80
Total		905	100

Sumber : Kantor Kelurahan Lakkang 2016

Dari Tabel diatas diketahui 39,4 % atau sebanyak 357 penduduk di Pulau Lakkang berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar dan hanya 13,8 % atau sebanyak 125 jiwa penduduk yang pendidikan terakhirnya adalah SMP. Pada tingkat pendidikan terakhir SMA tercatat 15,5 % atau 140 jiwa sementara pada tingkat diploma sebanyak 1,4 % atau 13 jiwa serta tingkat sarjana sebanyak 0,8%

atau 7 jiwa. Penduduk Pulau Lakkang dalam kategori DO/belum sekolah adalah 29,1 % atau sebanyak 263 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk.

B. Program Ekowisata Kota Makassar

Di tengah dinamika sosial ekonomi dunia, ditandai krisis ekonomi dunia, globalisasi dunia yang belum tuntas, kenaikan harga minyak dunia, telah berkembang suatu jenis jasa wisata yang memberi jaminan bagi terciptanya kesejahteraan. Sektor usaha tersebut dikenal dengan ecotourism atau ekowisata. Menurut *The International Ecotourism Society* atau TIES (1991), ekowisata adalah perjalanan ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal.

Menurut hemat saya, hal ini disebabkan karena wisatawan seringkali merasa bosan dan jenuh (*annoyance*) dengan pariwisata massal yang bersifat rekreasi biasa. Mereka ingin mendapatkan kualitas dan jasa dari jenis pariwisata baru yakni ekowisata atau bisa juga di sebut wisata minat khusus. Karena mereka yang melakukan ekowisata cenderung untuk mendalami suatu kajian (*something*), seperti penelitian flora dan fauna, tanah, *sulvikultur*, *geographic*, tanah, air, dan sebagainya yang bersifat *education*.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.5008 pulau memiliki potensi dan kekayaan alam yang bernilai tinggi dalam pasar industri wisata alam, khususnya ekowisata karena Indonesia sendiri berada pada *Rainforest Geographic*. Indonesia merupakan salah satu negara paling kaya dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) paling komplit ke tiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Selain itu Indonesia memiliki garis pantai paling panjang

di dunia yakni 80.791 KM dengan cakupan laut seluas 3,1 juta KM², dengan berbagai macam terumbu karang yang paling komplit atau lebih dari 75% terumbu karang yang ada di dunia, (Amazing potential of Indonesia).

Sebagai bentuk wisata yang *trend*, ekowisata memiliki kekhususan tersendiri yaitu mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan penduduk lokal dan menghargai budaya lokal. Taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melimpah menjadi salah satu bagian pengembangan ekowisata. Taman nasional yang menawarkan wisata ekologis banyak diminati wisatawan, hal ini karena adanya pergeseran paradigma kepariwisataan internasional dari bentuk pariwisata massal (mass tourism) ke wisata minat khusus yaitu ekowisata (Nugroho, 2011: 3).

Kelembagaan ekowisata diluar wilayah taman nasional juga dapat dikembangkan. Wilayah tujuan ekowisata tersebut biasanya memiliki karakteristik konservasi yang kuat baik dari aspek sosial maupun lingkungannya. Kearifan, pengalaman, dan nilai-nilai budaya sedemikian menyatu dengan lingkungan untuk mendukung kehidupan ekonomi. Wilayah tujuan ekowisata itu dapat menjadi bagian dari ekosistem pesisir, lautan, hutan atau daratan di sekitar kawasan konservasi, desa atau wilayah yang memiliki nilai-nilai khas yang harus diwariskan untuk generasi mendatang.

Makassar yang memiliki posisi strategis di kawasan Indoneasia Timur dan sebagai destinasi wisata. Setiap tahunnya wisatawan lokal maupun mancanegara datang ke makassar untuk menikmati destinasi wisata yang ada. Melihat

fenomena tersebut, maka pemerintah kota Makassar yang dipimpin oleh Walikota Danny Pomanto melalui Perda Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2015 tentang menciptakan 12 kawasan terpadu dan 12 kawasan strategis Kota Makassar, terdapat kawasan bisnis dan pariwisata terpadu (dengan brand “Tanjung Bunga” *Waterfront City*). Berbagai tempat yang berpotensi dijadikan sebagai tempat pengembangan program ekowisata di kota Makassar yaitu Sungai Jeneberang, sungai Tallo, Kelurahan wisata Lakkang hingga perairan di pesisir dan pinggiran Makassar. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Makassar berikut ini, dia mengatakan :

“Yaa sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2015, menetapkan 12 kawasan terpadu dan 12 kawasan strategis Kota Makassar, diharapkan program ekowisata akan berjalan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan, selain menambah kas pemasukan kota juga sebagai tempat usaha baru bagi warga sekitarnya” (Hasil Wawancara dengan ARM, 1 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa program ekowisata di kota makassar sekiranya diperkuat dengan perda yang kemudian diharapkan menjadi kegiatan ekonomi yang positif bagi pemerintah kota makassar maupun masyarakat itu sendiri. Selanjutnya pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program ekowisata Kota Makassar dan menjadikan Desa Lakkang ini sebagai salah satu bagian dari program itu, tentu saja mendapat dukungan yang positif dari warga sekitar. Selain dikenalnya daerah ini juga membuka peluang usaha baru, ada yang jualan Makanan dan Minuman, dan lainnya. Sekiranya ini adalah hal yang positif” (Hasil Wawancara dengan AN, 5 Juli 2018).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu warga yang ada di sekitaran Sungai Tallo, sekaligus pelaku usaha disana:

“Dipromosikannya Kelurahan Lakkang oleh pemerintah Kota Makassar sebagai bagian dari program ekowisata di Kota Makassar, memberikan dampak ekonomi bagi kami, kami menyediakan fasilitas perahu bagi wisatawan yang ingin mengitari sungai tallo” (Hasil Wawancara dengan Ks, 5 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis berpendapat bahwa program ekowisata di kota Makassar membuat partisipasi masyarakat yang tinggi karena disana ada nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat sekitar.

Selain di Mengambil contoh sungai Tallo ,dimana jalur utama yang memanfaatkan sungai Tallo sebagai sungai terbesar yang melintas tepat di tengah kota akan melewati sebelah barat kawasan pergudangan terpadu. Jalur ini sekaligus sebagai kawasan penghubung alami dengan kawasan riset terpadu yang terletak di delta Lakkang, Kecamatan Tallo dan kawasan pelabuhan terpadu.Selain itu adanya potensi pengembangan hutan mangrove di sungai ini untuk biota sungai serta pemanfaatan lahan tidur si sepanjang bantaran sungai Tallo.Hal ini lebih diperkuat lagi dengan adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah .

Tak kalah dengan Sungai Tallo, Desa wisata Lakkang mampu menarik wisatawan untuk menikmati wisata sungai serta tujuan Kelurahan wisata yang ada di Lakkang .Selain itu Kelurahan ini bisa dijadikan sebagai kawasan penyangga ruang terbuka hijau dan pengembangan ekosistem biota sungai yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga.Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar yang penulis wawancarai mengatakan bahwa :

“Ada beberapa destinasi yang kemudian dimasukkan sebagai bagian dari program ekowisata kota Makassar yaitu di Kelurahan Lakkang yang menarik wisatawan untuk hadir disana menikmati wisata sungai, kawasan penyangga ruang terbuka hijau dan pengembangan ekosistem biota sungai yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga” (Hasil Wawancara dengan ARM, 1 juli 2015).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu warga yang ada di

Kelurahan Lakkang yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa:

“Kelurahan Lakkang memiliki potensi wisata yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke sini. Selain itu juga memberikan dampak ekonomi bagi kami. Karna adanya peluang usaha dan jasa yang berkembang” (Hasil Wawancara dengan Ha, tanggal 5 Juli 2018).

Salah seorang warga yang ada Kelurahan Lakkang juga mengatakan hal yang sama:

“iya dengan adanya program ekowisata di Kelurahan Lakkang membuka kesempatan kepada warga sekitar untuk memanfaatkan dengan datang para wisatawan ke sini” (Hasil wawancara dengan L, pada tanggal 5 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa dengan adanya program ekowisata di Kelurahan Lakkang membuat ekonomi warga mengalami peningkatan yang signifikan.

Pengembangan sistem transportasi air di tempat ini bisa pula dijadikan sebagai sarana alternatif dalam mengatasi kasus kemacetan yang terus terjadi di kota Makassar akibat tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan infrastruktur jalan. Agar pengembangan ekowisata di kota Makassar berjalan dengan baik maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan juga dibutuhkan peningkatan infrastruktur pendukung seperti armada transportasi wisata sungai, dermaga dan akses jalan

Di bulan Maret 2011, Sulawesi Selatan didatangi oleh puluhan perusahaan perjalanan wisata nasional dari delapan negara dimana mereka tersebut merupakan peserta dari *International Eco Tourism Bussines Forum and Mart 2011 "Enchating Butterfly"* yang melakukan tur di sejumlah objek wisata di Sulawesi Selatan terutama Makassar untuk melihat potensi paket wisata alam dan budaya (ekowisata). Forum bisnis ini diselenggarakan untuk meningkatkan minat masyarakat pada ekowisata, mempromosikan paket ekowisata dan meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu adanya ketertarikan Bank dunia yang memberikan dukungan dengan menyiapkan konsultan transportasi air asal Amerika untuk membantu pemerintah daerah menyusun detail tata ruang transportasi air di Makassar. Bank dunia bersiap diri membantu dengan melakukan pembiayaan assesment dan analisis pengembangan transportasi di kota ini.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar

Berangkat dari definisi mengenai ekowisata tersebut, maka mekanisme untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian. Dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan, partisipasi masyarakat pada dasarnya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Perubahan nilai yang terus berkembang di masyarakat menyebabkan beberapa kebiasaan yang sebelumnya telah ada pada masyarakat turut mengalami perubahan. Bahkan, pada beberapa aspek, hal tersebut sudah hilang dari kebiasaan masyarakat. Karenanya, untuk kembali

mencitakan partisipasi masyarakat, diperlukan sebuah mekanisme dan proses yang membutuhkan waktu, tenaga, dan bahkan dana yang tidak singkat dan kecil.

Sebuah proses menciptakan partisipasi masyarakat tersebut, keberadaan masyarakat atau komunitas lokal di sekitar lokasi objek wisata merupakan modal sosial yang harus diperhatikan. Coleman secara umum mendefinisikan modal sosial sebagai sebuah aset produktif dimana di dalamnya terdapat struktur hubungan di antara orang per orang (*between persons*) dan di antara kalangan orang (*among persons*) (Ikeda, 2008). Hal ini muncul karena Coleman melihat bahwa modal sosial melekat pada struktur sosial yang ada. Struktur sosial yang dimaksudkan di sini ialah hubungan, jaringan, kewajiban, harapan yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan dan sifat dapat dipercaya dari orang-orang yang saling berhubungan (Lawang, 2005).

Saat partisipasi masyarakat mulai tumbuh, bentuk partisipasi masyarakat tersebut juga harus dapat diperhatikan. Hal ini menjadi penting terkait dengan sejauh mana partisipasi masyarakat dapat mendukung keberadaan ekowisata tersebut. Menurut Jule (1996), ada beberapa macam partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi dengan Cara Memberikan Informasi
2. Partisipasi Fungsional
3. Partisipasi Interaktif
4. Mobilisasi Diri

1. Partisipasi Memberikan Informasi

Pada partisipasi ini masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pernyataan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya. Namun pada partisipasi ini masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dalam mempengaruhi proses penyelesaian. Hasil penelitian tersebut nantinya tidak akan dibahas bersama masyarakat.

1.a. Masyarakat Mengajukan Pandangan

Pada partisipasi ini, masyarakat mengajukan suatu pandangan atau pendapat tentang kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Lakkang ikut berpartisipasi dengan menghadiri setiap pertemuan dengan pemerintah kota Makassar yang akan membahas tentang program ekowisata yang akan dilaksanakan di Kelurahan Lakkang. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Lakkang yang penulis wawancarai mengatakan bahwa :

“Pemerintah sebelumnya sering datang kesini guna mensosialisasikan program kerja yang akan diterapkan di sini. Sering kali diadakan pertemuan dengan masyarakat. Saya lihat masyarakat juga sangat antusias tentang program ini. Dapat dilihat dari adanya beberapa yang mengajukan pandangan atau ide-ide yang berhubungan dengan program tersebut” (Hasil Wawancara dengan Jn, tanggal 7 Juli 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pemuda yang ada di Kelurahan Lakkang mengatakan :

“Para pemuda juga sering diikutkan dalam setiap pertemuan dengan pemerintah yang datang kesini, sering kali yang dibahas adalah tentang program ekowisata yang akan diterapkan di sini” (Hasil Wawancara dengan Fr, tanggal 7 Juli 2018).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pegawai Dinas Pariwisata Kota

Makassar yang mengatakan bahwa :

“Program ekowisata telah melalui serangkaian pertemuan dengan masyarakat yang daerahnya ikut dalam program ekowisata yang pemerintah canangkan. termasuk daerah Lakkang, seringkali kami datang untuk bertemu dan membahas tentang program tersebut, saya lihat masyarakat sangat antusias terhadap hal tersebut, mereka juga ikut mengajukan pandangan maupun memberikan ide” (Hasil wawancara dengan Ps, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dengan cara memberikan informasi dengan mengajukan pandangan sangat aktif, terbukti dari beberapa kali pemerintah kota mengadakan pertemuan dengan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam mengajukan pandangan-pandangan sangat tinggi.

1.b. Berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan/kuesioner

Pada partisipasi ini masyarakat menjawab pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang telah dibagikan oleh tim ahli maupun para profesional yang telah datang ke Kelurahan Lakkang dalam kapasitas mereka sebagai tim ahli program ekowisata yang pemerintah Kota Makassar canangkan.

Salah satu warga yang penulis wawancarai mengatakan bahwa :

“Pemerintah kota Makassar pernah hadir disini dengan tim ahlinya seperti akan melakukan penelitian. Mereka membagikan selebaran pertanyaan kepada warga, kami pun antusias dengan ikut menjawab pertanyaan tersebut guna terlaksananya program ekowisata dengan baik” (Hasil Wawancara dengan Fr, tanggal 7 Juli 2018).

Hal ini juga dibenarkan oleh pegawai di Dinas Pariwisata yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa :

“sebelumnya Pemerintah hadir di Kelurahan Lakkang untuk mensosialisasikan program ekowisata dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung dan juga menyebarkan pertanyaan dalam

bentuk kuesioner. Dan warga disana sangat antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan ini membuat kerja kami ringan dikarenakan dukungan dari warga sekitar” (Hasil Wawancara dengan Ps, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dengan cara menjawab pertanyaan secara langsung maupun dalam bentuk kuesioner sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terjawabnya seluruh pertanyaan yang diberikan dan terselesaikannya semua kuesioner yang dibagikan. Ini membuat kerja pemerintah dalam merumuskan program tentang ekowisata menjadi lebih mudah.

1.c. Berpartisipasi dengan cara memberikan informasi

Partisipasi ini adalah dengan cara masyarakat memberikan informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah tentang program yang akan dilaksanakan. masyarakat di Lakkang yang penulis wawancarai mengatakan :

“Masyarakat disini sangat antusias terhadap program ekowisata tersebut, kami memberikan informasi kepada pemerintah kota yang hadir dengan cara memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya apapun yang berkaitan dengan keperluan maupun informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah” (Hasil Wawancara dengan Fr, tanggal 7 Juli 2018).

\ Hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa :

“iya, partisipasi masyarakat sangat tinggi dala memberikan informasi yang berkaitan tentang program ekowisata yagn akan diterapkan disini. Data masyarakat ataupun tentang daerah ini kami berikan informasinya” (Hasil Wawancara dengan Ha, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan program ekowisata yang diterapkan di Kelurahan Lakkang sangat tinggi, ini sangat bermanfaat guna terlaksana program ekowisata di Kelurahan Lakkang.

Partisipas masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilihat dari partisipasi mereka dalam mengajukan pandangan, menjawab pertanyaan yang diberikan, serta masyarakat memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam membantu program yang akan dijalankan.

2. Partisipasi Fungsional

Pada partisipasi ini masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan kegiatan, kelompok ini nantinya akan membuat keputusan-keputusan yang akan disepakati bersama. Tujuan pembentukannya pun nantinya bisa memberikan manfaat bagi kelompoknya, tidak merugikan satu sama lain. Biasanya pada awal pembentukan kelompok ini akan bergantung pada pihak luar atau *fasilitator* guna memberikan arahan bagi kelangsungan kelompoknya, namun nantinya jika mereka mampu tidak akan menggunakan fasilitator lagi, tapi mereka mandiri.

2.a. Terdaftar sebagai anggota dalam kelompok usaha/kerja yang ada

Kelompok usaha yang ada di Kelurahan Lakkang dibentuk oleh masyarakat yang ada guna sebagai tempat mereka menyalurkan aspirasi mengenai program ekowisata di sana. Hampir separuh orang dewasa yang ada disana ikut dalam kelompok tersebut. Ini disampaikan oleh ketua kelompok yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa :

“Guna mensukseskan program ekowisata di sini, kami bersama masyarakat sekitar membentuk kelompok usaha sebagai wadah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya yang berhubungan dengan ekowisata yang dicanangkan pemerintah kota makassar. Kelompok ini memiliki pengurus yang sebagian berasal dari orang dewasa dan memiliki usaha” (Hasil Wawancara dengan Ks, tanggal 7 Juli 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh pegawai di Dinas Pariwisata Kota Makassar yang penulis wawancarai mengatakan bahwa :

“Bahwa dalam pelaksanaannya nanti program ekowisata tersebut akan dibentuk kelompok-kelompok yang akan di jalankan oleh masyarakat di Kelurahan Lakkang, guna mengakomodir semua kegiatan yang ada disana, baik kelompok usaha maupun kelompok masyarakat itu sendiri agar nantinya program ekowisata tersebut dalam berjalan baik, kami hanya menyediakan fasilitator bagi mereka untuk membentuk kelompok-kelompok tersebut” (Hasil wawancara dengan Ps, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal terdaftar sebagai anggota maupun pengurus sangatlah tinggi, hal ini dapat dilihat dari pengurus kelompok yang ada adalah para warga yang memilliki usaha yang berhubungan langsung dengan program ekowisata tersebut.

2.b. Berpartisipasi dengan cara ikut aktif dalam kegiatan yang telah ditentukan

Setelah kelompok terbentuk, selanjutnya adalah menjalankan program kerja yang telah ada. Setiap program kerja maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut maka setiap anggota berhak untuk ikut serta dalam penyelenggaraannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan warga yang juga sebagai ketua kelompok tersebut yang mengatakan bahwa :

“setiap anggota yang ada dalam kelompok ini,terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan ini berguna untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dukungan dari anggota sangat positif” (Hasil Wawancara dengan Ks, tanggal 7 Juli 2018).

Hal tersebut juga disampaikan oleh warga Kelurahan Lakkang yang mengatakan bahwa :

“Warga bersama-sama membentuk kelompok-kelompok yang kemudian akan memfasilitasi warga dalam menyukseskan program ekowisata di Kelurahan Lakkang, guna pengelolaannya bisa sejalan dengan pemerintah kota Makassar agar tujuannya dapat terpenuhi dan program kerja juga dapat terlaksana dengan baik dengan terlibat aktifnya para anggota” (Hasil wawancara dengan Fr, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sangat aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang ada.

2.c. Ikut merumuskan program yang akan dijalankan

Setiap kelompok kerja pastinya ada program kerja yang harus mereka jalankan dalam setiap masa jabatan kerja yang telah ditentukan. Dalam hal ini biasanya diadakan pertemuan guna merumuskan kegiatan apa yang bisa diusulkan dan disepakati bersama. Kelompok kerja yang ada di Lakkang setiap tahunnya akan mengadakan pertemuan untuk mencanangkan program maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program ekowisata. hal ini dikatakan oleh ketua kelompok yang mengatakan bahwa :

“hampir setiap kali dalam setahun sering diadakan pertemuan guna merumuskan program yang akan dijalankan. Maka para pengurus juga ikut menyampaikan program yang akan dijalankan dan sesuai

dengan program ekowisata disini” (Hasil Wawancara dengan Ks, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi fungsional masyarakat di Kelurahan Lakkang dalam program ekowisata, dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok yang terbentuk di Kelurahan Lakkang guna memfasilitasi program ekowisata yang salah satunya ada di sana, kelompok ini akan membantu kegiatan-kegiatan masyarakat baik dalam bidang usaha maupun sosial kemasyarakatan dalam menyukseskan program ekowisata Kota Makassar.

3. Partisipasi Interaktif

Pada partisipasi ini masyarakat menganalisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan yang telah ada. Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

3.a. Kelompok yang telah ada sebagai pengontrol

Dalam partisipasi ini masyarakat yang ada di Kelurahan Lakkang, merencanakan kegiatan-kegiatan guna menyukseskan program ekowisata. Kelompok-kelompok yang ada akan mengontrol atas apa yang dikerjakan oleh masyarakat agar sesuai dengan tujuan dari program ekowisata yang di Kelurahan Lakkang.

Menurut pegawai di Dinas Pariwisata Kota Makassar yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa :

“Setelah kelompok-kelompok terbentuk, maka partisipasi masyarakat akan di kontrol oleh kelompok tersebut agar perencanaan kegiatan dalam program ekowisata sejalan dengan tujuan yang pemerintah Kota Makassar ingini, kelompok tersebut mempunyai andil yang sangat penting” (Hasil wawancara dengan Tf, tanggal 7 Juli 2018).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh warga di Kelurahan Lakkang, yang mengatakan bahwa :

“keberadaan kelompok yang telah terbentuk dalam menyukseskan program ekowisata di Kelurahan Lakkang guna memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, serta masyarakat juga ikut ambil bagian dalam kelompok tersebut sehingga perencanaan kegiatan dapat terkontrol dengan baik” (Hasil wawancara dengan Fr, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi interaktif masyarakat Kelurahan Lakkang dalam mensukseskan program ekowisata kota Makassar dapat dilihat dengan ikut sertanya masyarakat dalam kelompok yang telah terbentuk dalam merencanakan kegiatan program ekowisata Kota Makassar.

3.b. Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan

Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang

begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau dengan perencanaan. Dalam hal ini kelompok usaha yang ada di Lakkang melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan, pembentukan lembaga yang ada maupun pembentukan lembaga baru. Menurut ketua kelompok yang penulis wawancarai mengatakan bahwa :

“perencanaan kegiatan sangatlah penting dalam suatu kelompok kerja, karena hal tersebut merupakan langkah bagi kelompok tersebut agar tetap ada. Masyarakat sebagai bagian dari mitra ikut terlibat dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dan mereka juga ikut terlibat didalamnya” (Hasil wawancara dengan Ks, pada tanggal 7 Juli 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa :

“sejauh ini yang saya lihat, kelompok usaha yang ada selalu melibatkan masyarakat dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, hal ini dapat menjadi modal yang berharga jika masyarakat dilibatkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik” (Hasil wawancara dengan Fr, pada tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang akan dijalankan oleh kelompok usaha yang ada sangatlah tinggi, hal tersebut sangat membantu kelompok usaha yang dalam menjalankan kegiatan dikarenakan partisipasi masyarakat yang baik.

3.c. Berpartisipasi sebagai pengontrol dalam kelompok

Partisipasi sebagai pengontrol ada pada jajaran pengurus dari kelompok usaha yang dimana mereka akan mengontrol dari dalam tentang keputusan-keputusan yang akan diambil oleh kelompok yang ada. Sedangkan masyarakat yang ada diluar dari kelompok hanya sebagai pelaksana dari keputusan yang telah diambil tanpa bisa memberikan aspirasi. Ketua kelompok usaha yang penukis wawancara mengatakan bahwa :

“Setiap pengurus yang ada di dalam kelompok ini maka mereka berperan sebagai pengontrol dari setiap keputusan yang telah disepakati bersama, dikeluarkan bersama-sama maka akan dilaksanakan bersama-sama pula. Namun masyarakat yang tidak terlibat didalamnya hanya sebagai pelaksana dari keputusan yang telah disepakati bersama” (Hasil wawancara dengan Ks, pada tanggal 7 Juli 2018)

Hal ini juga dikatakan oleh salah seorang warrga yang penulis wawancara yang mengatakan bahwa :

“Kami yang ada didalam kelompok sebagai pengurus, memiliki tanggung sebagai pengontrol dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok yang ada” (Hasil wawancara dengan Wy, pada tanggal 7 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dengan cara sebagai pengontrol dalam kelompok sangatlah baik, masyarakat akan mengawasi keputusan yang telah disepakati oleh kelompok yang ada.

Partisipasi interaktif ditunjukkan masyarakat yang ada di Lakkang sangatlah tinggi, ini bisa dibuktikan dengan partisipasi masyarakat sebagai pengontrol keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok yang ada serta menjadi

analisis dari perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ekowisata di Kelurahan Lakkang.

3. Mobilisasi Diri

Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil secara bebas (tidak dipengaruhi dari pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya. Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya, masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan habis.

- a. Masyarakat ikut memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada

Partisipasi ini dimana masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada. Di Lakkang sendiri sumber daya alam maupun sumber daya manusianya mampu bersinergi menciptakan keharmonisan dalam program ekowisata yang dimana menetapkan Lakkang sebagai salah satu lokasinya. Lakkang sendiri memiliki beberapa peninggalan jaman penjajahan yang menjadi salah satu obyek yang menarik wisatawan untuk datang kesana. Ini dikatakan oleh salah seorang warga yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa :

“salah satu daya tarik wisatawan untuk hadir di sini adalah bunker peninggalan jepang yang masih terawat sampai hari ini, masyarakat ikut serta menjaga hal tersebut tetap baik” (Hasil wawancara dengan Fr, pada tanggal 7 Juli 2018)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang warga yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa :

“bunker yang ada disini itu dirawat dengan baik oleh masyarakat, biar menjadi hal yang unik dan menarik sehingga wisatawan dapat hadir disini. Ini juga akan memberikan tambahan bagi perekonomian masyarakat sekitar, ada yang memanfaatkan hal tersebut untuk menjual souvenir maupun menggunakan perahu sebagai alat transportasi yang digunakan wisatawan yang berkunjung ke sini” (Hasil wawancara dengan Jn, pada tanggal 7 Juli 2018)..

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat ikut menjaga segala sumber daya yang ada di Lakkang agar diperuntukkan bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar guna suksesnya program ekowisata di Lakkang.

b. Mengambil inisiatif secara bebas

Partisipasi ini masyarakat pada program ekowisata di Kelurahan Lakkang Kota Makassar, masyarakat bukan hanya menyediakan sumber daya namun ikut juga menyediakan apa yang bisa mereka hadirkan guna menyukseskan program tersebut karena bagi mereka jika program ini berhasil maka akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu warga yang ada di sana yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya program ini tentu akan disambut antusias oleh masyarakat sekitar, kami tentu akan siap memberikan apapun yang dibutuhkan dalam program ini, baik tenaga maupun materil selama

kami mampu, ini juga akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian masyarakat sekitar” (Hasil wawancara dengan Ka, tanggal 7 Juli 2018).

Pernyataan serupa disampaikan juga oleh salah satu warga lainnya yang penulis wawancarai :

“Dengan adanya program ekowisata di Kelurahan Lakkang ini membuat kami merasa terbantu, adanya wisatawan yang datang tentunya akan menambah penghasilan bagi kami yang membuka usaha kecil-kecilan, kami pun sangat antusias jika pemerintah membutuhkan sesuatu yang bisa membuat program tersebut berjalan sukses” (Hasil wawancara dengan Wd, tanggal 7 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi untuk insentif materil tidak terlalu diperhitungkan bagi masyarakat di Kelurahan Lakkang, bagi mereka jika nantinya program ini berjalan maka akan membawa dampak yang besar bagi keadaan ekonomi di desa mereka, hadirnya program ekowisata ini tentu memberi kesempatan kepada warga untuk membuka usaha , baik itu usaha makanan minuman, souvenir maupun penyewaan perahu untuk mengakomodasi para wisatawan yang hadir di Kelurahan Lakkang.

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Lakkang terhadap program ekowisata yang digerakkan oleh pemerintah Kota Makassar mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat yang ada di Kelurahan Lakkang. ini ditunjukkan betapa antusiasnya

mereka dalam mengikuti setiap kegiatan mulai dari perencanaan hingga berjalannya program ekowisata Kota Makassar. Masyarakat sekitar juga memanfaatkan keberadaan program ekowisata untuk membuka usaha sebagai bagian dari meningkatkan perekonomian mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekowisata Di Kelurahan Lakkang Kota Makassar menunjukkan dengan cara :

1. Partisipasi dengan Cara Memberikan Informasi

Pada partisipasi ini masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pernyataan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya. Namun pada partisipasi ini masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dalam mempengaruhi proses penyelesaian. Hasil penelitian tersebut nantinya tidak akan dibahas bersama masyarakat

2. Partisipasi Fungsional

Pada partisipasi ini masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan kegiatan, kelompok ini nantinya akan membuat keputusan-keputusan yang akan disepakati bersama. Tujuan pembentukannya pun nantinya bisa memberikan manfaat bagi kelompoknya, tidak merugikan satu sama lain. Biasanya pada awal pembentukan kelompok ini akan bergantung pada pihak luar atau *fasilitator* guna memberikan arahan bagi kelangsungan kelompoknya, namun nantinya jika mereka mampu tidak akan menggunakan fasilitator lagi, tapi mereka mandiri.

3. Partisipasi Interaktif

Pada partisipasi ini masyarakat menganalisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau

penguatan yang telah ada. Partisipasi ini cenderung melibatkan metode interdisiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

4. Mobilisasi Diri

Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil secara bebas (tidak dipengaruhi dari pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan program ekowisata yang digerakkan oleh pemerintah Kota Makassar mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat yang ada di Kelurahan Lakkang. Hendaknya pemahaman masyarakat terhadap program ini dapat turut berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata yang ada dalam Lakkang, sehingga dengan adanya program ekowisata ini dapat memberikan banyak manfaat bagi warga setempat terutama dalam hal perekonomian karena untuk dapat memasuki Kelurahan Lakkang tidak menggunakan transportasi darat karena pulau Lakkang dikelilingi oleh beberapa sungai, sehingga ketika ingin

memasuki tempat tersebut harus menggunakan transportasi air, yaitu perahu kecil yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sehingga secara otomatis perekonomian dapat meningkat, dengan adanya program ekowisata yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan menempatkan Pulau Lakkang sebagai destinasi wisata sehingga membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha dalam melestarikan Pulau Lakkang sebagai tempat wisata bersejarah yang ada di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta. Jakarta: BaruSwasta
- EL-mostafa Benlanmlih. 2010. *Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan*, Jakarta: UNDP Indonesia
- Ester Jawanti. 2003. *Peranan Industri Pemerintah Daerah 2010* . Jakarta: Erlangga
- ExyJ.Moeloeng'. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Hariadi, 2009. *Konsep; Defenisi, perumusan, tingkatan dan jenis strategi*. Bandung: PT. Erlangga
- Ibnu Sukotjow. 1999. *Pengantar Bisnis Modern*, Jakarta: Liberty Deddy.
- Irawan dan Suparmoko. 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPEE.
- Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Otonomi dan pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan, strategi, dan Peluang)*, Jakarta: Erlangga
- Marrus, S, K. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga
- Moh.Nazir.1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mansour Faqih 2007. *Partisipasi Masyarakat* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
Offset. Ecpose.2003. *Ekonomi Pancasila VS Hantu Globalisasi*.Jember: Lembaga Pers Mahasiswa Ekonomi (LPME) Fakultas Ekonomi Universitas Jember-Jawa Timur.
- Mudarajat Kuncoro,2006, *Ekonomi PemBangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (Upp) Stim Ykpnd/ Hampykpn.
- Mudrajad, Kuncoro, 1994. *Otonomi daerah usaha kecil* . Jakarta: PT.Remaja Rosda
- M irfan, 2000. *Koperasi, Kewirausahaan, Dan Usaha kecil*, Semarang: Rinekacipta.
- Noor, Faried Ma'ruf. 1983. *Menuju keluarga sehat dan sejahtera dan bahagia*, Bandung: PT. Alma
- Nana Syaodiah Sukma Dinata.2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

- Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko .2002. *Koperasi*, Semarang: Rineka Cipta.
- Saladin, Djaslim. 2003. *Manajemen Pemasaran*, Linda Karya, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwarsono, 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Umar, Husein. 2003. *Strategic Manajemen In Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : M. Idris
Nomor Stambuk : 10564 0128 611
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Ekowisata Kelurahan
Lakkang Kota Makassar

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)		
2	Dra. Hj. Musliha Karim, M. Si		
3	Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH		
4	Drs. H. Mappigau Samma, M. Si		

Makassar, 2018
Mengetahui :
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Husnul Khatimah
Nomor Stambuk : 10564 205 614
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Koordinasi Dinas Kelautan dan perikanan dengan kepolisian dalam pencegahan illegal fishing di Kabupaten Selayar

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)		
2	Dra. Hj. Musliha Karim, M. Si		
3	Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH		
4	Drs. H. Mappigau Samma, M. Si		

Makassar, 2018
Mengetahui :
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Muh Yusuf
Nomor Stambuk : 105640 166 712
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Pembagian kekuasaan dalam sistem adat ammatoa kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)		
2	Dra. Hj. Musliha Karim, M. Si		
3	Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH		
4	Drs. H. Mappigau Samma, M. Si		

Makassar, 2018
Mengetahui :
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Rofidah
Nomor Stambuk : 10564 0200 914
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Impelementasi kebijakan corporate sosial responsibility PT Sukses mantap sejahtera terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)		
2	Dra. Hj. Musliha Karim, M. Si		
3	Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH		
4	Drs. H. Mappigau Samma, M. Si		

Makassar, 2018
Mengetahui :
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

RIWAYAT HIDUP



M. Idris, lahir di Lametuna pada tanggal 8 September 1994. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan H. Tike dengan Alm. Hj. Mare. Penulis mulai menempuh Pendidikan formal di SDN 1 Lametuna pada tahun 2000- kemudian melanjutkan kesekolah tingkat lanjutan pertama pada SMPN 2 Libureng, pada tahun 2005-2008. Penulis melanjutkan Pendidikan sekolah tingkat menengah pada SMA Negeri 19 Makassar, pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011-. Setelah melalui seleksi SPBM tahun 2011, penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat ridha Allah subhanahu wataala, dan iringan doa dari orang tua dan saudara serta teman-teman yang turut memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menepuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sehingga berhasil menyusun skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Ekowisata Kelurahan Lakkang Kota Makassar.